KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pengesahan kode etik dan tata beracara MKD ditunda
Tanggal : Rabu, 28 Januari 2015
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 3

PARLEMEN

Pengesahan Kode Etik dan Tata Beracara MKD Ditunda

JAKARTA (Suara Karya): Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon yang beragendakan Pengesahan Peraturan DPR mengenai Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kohormatan Dewan (MKD), Selasa (27/1) akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan karena setelah Ketua MKD Surahman melaporkan jalannya pembahasan Kode Etik dan Tata Beracara MKD, sejumlah anggota meminta beberapa materi dalam Kode Etik tersebut perlu dikaji lagi.

Interupsi yang disampaikan Popong Djundjunan antara lain menyoroti Rancangan Kode Etik Pasal 12 ayat (2), anggota dilarang terlibat dalam iklan, sinetron dan/atau kegiatan seni lainnya yang bersifat komersial, khususnya yang merendahkan wibawa dan martabat sebagai anggota. Ayat ini perlu penjelasan lebih lanjut, berarti yang tidak merendahkan wibawa dan martabat anggota, boleh dilakukan.

Sedangkan anggota Fraksi PAN Totok Daryanto menyoroti pasal 17 ayat (5) dimana anggota dilarang mengutus tenaga ahli, staf administrasi atau pegawai Setjen DPR menghadiri atau mewakili rapat dan pertemuan yang menjadi fungsi, tugas dan wewenangnya. Ketentuan ini dinilai melanggar hak-hak anggota sebab tidak mungkin setiap anggota menghadiri rapat-rapat komisi atau AKD yang menjadi tanggungjawabnya.

"Intinya masih banyak keberatan dan sejumlah anggota Dewan, termasuk perlu disinkronkan dengan UU MD 3, sehingga tidak harus disahkan sekarang ini. Masih perlu didalami oleh fraksi-fraksi," kata anggota F PDI Perjuangan Rieke Diah Pita Loka.

Karena masih banyak keberatan dari beberapa anggota DPR, akhirnya Ketua Rapat Fadli Zon menawarkan kepada peserta Rapat Paripurna " Setuju Kode Etik dan Tata Beracara MKD untuk disempurnakan lagi".

Sebelumnya, juga, Ketua DPR Setya Novanto melantik lima anggota baru DPR setelah sebelumnya dilakukan mekanisme Pergantian Antar Waktu oleh masing-masing partai politik. Acara pelantikan dipimpin oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Politisi PKB Arzeti Bilbina dilantik menjadi anggota DPR untuk menggantikan (pergantian antar-waktu/PAW) Imam Nachrowi yang telah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Selain itu dua politisi PKB juga dilantik menjadi anggota DPR, yaitu Arifin Hakim Toha dan Holil Kaumas. Arifin menggantikan Marwan Jafar yang saat ini menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sedangkan Hakim menggantikan Hanif Dhakiri yang menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selain itu Setya juga melantik Ali Mahin sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem menggantikan HM Prasetyo yang menjadi Jaksa Agung dan politisi Partai Demokrat Mufniati dilantik menjadi anggota DPR menggantikan Sutan S yang meninggal dunia.

Dalam pelantikan itu, Setya didampingi tiga Wakil Ketua DPR yaitu Agus Hermanto, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon. Acara pelantikan itu dihadiri oleh 409 anggota DPR .

(Kardeni/Ant)